Journal of Education and Culture
Vol. 4, No. 2, Juni 2024 ISSN: 2797-8052

Dinamika Populisme di Era Digital: Pengaruh Media Sosial Terhadap Pemikiran Politik Masyarakat

St Junaeda[1], Khaerunnisa[2]
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum/Sosiologi Antropologi/Pendidikan Antropologi, Universitas Negeri Makassar
st.junaeda@unm.ac.id[1], khairunnisarida3@gmail.com[2]

Abstract

Populism has become a significant global political phenomenon in an increasingly connected digital age. The study explores the dynamics of populism in social media and its influence on public political thinking. We used analytical methods to explore how social media platforms strengthen populist narratives and influence public political perceptions and studies. Through literature analysis and library studies, we found that populist leaders can use social media as an effective way to convey their message directly to the wider masses. It gives them an opportunity to strengthen their identities, emphasize controversial issues, and gain emotional support. However, the negative consequence of this phenomenon is the spread of false or false information, which can increase political polarization and social fragmentation. We stress the importance of gaining a better understanding of the mechanisms that drive change in public opinion in the digital world as well as the elements that trigger populism. With this understanding, more effective strategies could be developed to control the negative effects of populism on social media and encourage critical thinking as well as constructive conversations among communities.

Keywords:

Populism
Digital Age
Social Media
Politics
Society

Abstrak

Populisme telah menjadi fenomena politik global yang signifikan di era digital yang semakin terhubung. Kajian ini mengeksplorasi dinamika populisme di media sosial dan pengaruhnya terhadap pemikiran politik masyarakat. Kami menggunakan metode analitis untuk mengeksplorasi bagaimana platform media sosial memperkuat narasi populis dan memengaruhi persepsi politik Masyarakat dan studi. Melalui analisis literatur dan studi pustaka, kami menemukan bahwa pemimpin populis dapat menggunakan media sosial sebagai cara yang efektif untuk menyampaikan pesan mereka secara langsung kepada massa yang lebih luas. Ini memberi mereka kesempatan untuk memperkuat identitas mereka, menekankan masalah kontroversial, dan mendapatkan dukungan emosional. Namun, konsekuensi negatif dari fenomena ini adalah penyebaran informasi yang salah atau palsu, yang dapat meningkatkan polarisasi politik dan perpecahan sosial. Kami menekankan betapa pentingnya mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang mekanisme yang menggerakkan perubahan opini publik di dunia digital serta unsur-unsur yang memicu populisme. Dengan pemahaman ini, strategi yang lebih efisien dapat dikembangkan untuk mengendalikan efek negatif populisme di media sosial dan mendorong pemikiran kritis serta percakapan konstruktif di antara masyarakat.

Corresponding Author:

St. Junaeda
Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
Universitas Negeri Makassar
St.junaeda@unm.ac.id

1. PENDAHULUAN

Istilah "media sosial" mengacu pada berbagai teknologi yang digunakan untuk bekerja sama, berbagi informasi, dan berinteraksi melalui pesan web. Karena internet terus berkembang, berbagai fitur dan teknologi yang tersedia untuk pengguna juga terus berkembang. Karena adanya konteks sosial-politik yang berbeda di Indonesia, penting untuk memahami bagaimana opini politik dibentuk. Indonesia menghadapi tantangan dan peluang yang berbeda di era digital. Karena ketergantungan yang meningkat pada media sosial sebagai sumber informasi utama, penting untuk menyelidiki dampak media sosial terhadap sikap politik masyarakat Indonesia. Haridison dalam judijanto [1]. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Alfiyani, media sosial memberikan dampak yang menyebabkan pergeseran dalam kampenya akibat munculnya media baru atau media sosial dan perkembangan teknologi komunikasi yang begitu pesat. Berdasar dari penelitian ini juga, Media massa ataupun media sosial merupakan komponen penting dari komunikasi politik, karena media dapat mempengaruhi pemikiran khalayak tentang apa yang dapat mereka sampaikan. Meskipun media benar-benar dapat mempengaruhi pemikiran khalayak, ada teori bahwa khalayak hanya pasif atau mengikuti apa yang sudah ada. Namun, pada akhirnya, teori ini ditolak oleh teori-teori lain yang muncul dari penelitian tindakan masyarakat[2].

Dalam negara demokrasi, diskusi tentang gerakan sosial yang mengutamakan kepentingan sebanyak mungkin orang atau kelompok tertentu, merupakan kemajuan dalam proses demokratisasi. Gerakan-gerakan semacam itu, yang kemudian mengambil bendera populisme semakin kuat di beberapa negara maju. Bahkan dalam pemilihan umum dan pemilihan presiden, partai populis secara mengejutkan menang. Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Ardipandanto berbagai pihak menyatakan bahwa politik identitas populis memiliki pengaruh yang signifikan dalam kampanye pemilihan presiden 2019 dan dianggap mengancam persatuan bangsa. Pengaruh populisme ini terutama berfokus pada strategi politik pemenangan presiden yang berdasarkan identitas agama, diciptakan begitu banyak disparatis antara pendukung Capres dan Cawapres sehingga membuat perbedaan terlihat seperti mereka yang menganut prinsip agama dan mereka yang tidak melakukannya[3]. Pada dasarnya, gerakan populisme adalah manifestasi ketidakpuasan rakyat terhadap monopoli kekuasaan dan ketimpangan demokrasi yang tidak dapat diperbaiki oleh pemerintah dan lembaga yang diwakili oleh rakyat. Demonstrasi gerakan dapat dilakukan dalam berbagai cara, termasuk aksi-aksi sosial, gerakan sosial, atau demonstrasi besar-besaran yang menuntut perubahan, bahkan dengan propaganda politik yang ekstrem.

Hadiz dalam Deha menyatakan bahwa, di Indonesia, gerakan populisme tidak selalu dianggap sebagai manifestasi budaya demokrasi. Ini menunjukkan bahwa gerakan populisme ekstrem melalui metode propaganda tidak relevan dengan kondisi demokrasi Indonesia saat ini. Catatan tentang demokrasi di masa lalu, terutama selama Orde Baru, menyebabkan luka sejarah bagi variasi demokrasi di Indonesia[4]. Di abad ke-21, ada kecenderungan yang kuat untuk polarisasi yang disebabkan oleh aliran informasi yang tak terkendali dan sulit diprediksi. Dalam aliran ini, polarisasi semakin diperkuat oleh politik identitas yang memikat, dengan prosesnya menjadi semakin jelas. Mouffe mendefenisikan bahwa populisme tidak memiliki basis ideologis yang tetap dan tidak terikat pada program-program tertentu. Selain itu, populisme tidak dapat disesuaikan dengan satu rezim politik tertentu. Sebaliknya, populisme adalah suatu cara berpolitik yang dapat mengambil berbagai bentuk tergantung pada konteks waktu dan tempatnya. Populisme dapat beradaptasi dengan berbagai struktur institusi yang ada[5].

Konsep populisme menjadi konsep yang cukup trend, hal ini disebabkan karena para pemimpin populis sangat suka mengatasnamakan rakyat meskipun gerakan dan perjuangan yang dilakukan memiliki tujuan untuk kelompok tertentu atau individu tertentu. Konsep populisme ini juga untuk memperkaya narasi-narasi dalam demokrasi di Indonesia. Karena narasi terkait populisme sudah sedemikian *trend* dalam dunia politik Indonesia maka berbagai penelitian-penelitian banyak dilakukan terkait dengan narasi populisme ini. Contohnya dalam sebuah penelitian, membicarakan kemunduran demokrasi yang disebabkan oleh munculnya Gerakan populis di seluruh dunia , Gerakan ini menghasilkan kebijakan yang tidak adil dan perpecahan bangsa, karena propaganda nativisme yang dipromosikan oleh kelompok populis[6]. Sebuah penelitian juga menunjukkan bahwa intoleransi di masyarakat digital Indonesia terkait dengan populisme. Pertemuan massa politik digunakan untuk menciptakan gambar seorang "pahlawan" yang peduli tentang nasib orang-orang, dikombinasikan dengan pesan-pesan apokaliptik dan pesimis yang merujuk pada pihak-pihak yang berkuasa yang menggunakan berita penipuan sebagai perantara. Intoleransi dan radikalisme saat ini telah dipengaruhi oleh populisme agama di Indonesia[7]. Penulis juga menemukan penelitian terkait populisme di media social Instagram atau sering disebut IG dan YouTube. penelitian ini membahas salah satu tokoh agama yakni Ustadz Felix Siauw, hasil penelitiannya menyatakan bahwa Felix Siau mengoptimalkan media sosial dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip moral, ketokohan, dan estetika. ditemukan tiga

alasan mengapa Felix Siauw dianggap sebagai representasi populisme Islam di kalangan netizen: pertama, populisme Islam dikaitkan dengan istilah anti-resistensi; kedua, populisme Islam dikaitkan dengan cerita anti-authoritarian; dan ketiga, populisme Islam menggabungkan cerita pembersihan agama dan kembali ke doktrin yang benar[8]. Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk membahas bagaimana dinamika populisme di era digital kaitannya dengan pengaruh media sosial terhadap pemikiran politik Masyarakat.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan model studi Pustaka. Data diperoleh dari referensi-referensi baik berupa jurnal, buku termasuk ujaran-ujaran yang berasal dari media sosial, Tikkok, Instagram, Facebook, Twitter bahkan YouTube. Mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Melalui penelitian kepustakaan, peneliti dapat mengembangkan pemahaman tentang kerangka kerja konseptual suatu topik dan menemukan dasar teoretis untuk penelitian ini. Penelitian ini juga membantu memastikan bahwa penelitian yang dilakukan telah mempertimbangkan karya-karya sebelumnya dan mengisi celah pengetahuan yang ada. Untuk mengumpulkan data, teknik yang digunakan adalah pencarian internet dan studi literatur terhadap beberapa referensi.

Terdapat tiga bagian utama dari teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini. Pertama, reduksi data, yang mengacu pada proses analisis untuk merangkum, mengidentifikasi tema dan pola yang paling penting, serta menghilangkan yang tidak relevan. Peneliti memilih informasi yang benar-benar penting untuk dimasukkan dalam karya ilmiah ini. Kemudian, Display Data (Penyajian Data) melibatkan penyusunan sekumpulan data agar dapat menyimpulkan. Penelitian kualitatif sering menghasilkan temuan baru; hasilnya dapat berupa deskripsi atau penjelasan sesuatu yang sebelumnya tidak jelas, sehingga menjadi lebih jelas setelah penelitian. Terakhir, kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan[9].

3. PEMBAHASAN

Populisme Di Era Digital

Populisme adalah fenomena komunikasi politik yang digunakan oleh para pemimpin dunia untuk mendapatkan suara rakyat. Namun, populisme membutuhkan popularitas dan citra, yang berdampak kuat pada elektabilitas pasangan calon politik[10]. Meskipun populisme telah menjadi topik yang banyak dibahas sejak lama, pembicaraan tentang fenomena ini masih jarang terdengar di kalangan masyarakat umum, terutama di Indonesia[11].

Di era digital, orang tidak lagi terpesona oleh esensi, melainkan oleh eksistensi. Mereka lebih memuja hal-hal yang memiliki daya tarik, kelicikan, sensitivitas, dan kemampuan untuk dimanipulasi. Periode digital telah menjadi saksi dari perubahan revolusioner dalam akses, penyebaran, dan berbagi informasi di seluruh dunia yang tak ada tandingannya[12]. Berbagai peluang dan kesulitan muncul dari populisme di era komputer dan Internet. Di satu sisi, kemudahan akses dan transmisi informasi melalui saluran digital memungkinkan pemimpin populis untuk mencapai audiens yang lebih luas dengan pandangan mereka. Hal ini mungkin membuat populis menjadi lebih menarik dan menguatkan basis dukungan mereka. Sebaliknya, era internet juga membuat mungkin bagi informasi palsu atau menyesatkan untuk menyebar dengan cepat, yang politisi populis mungkin memanfaatkannya untuk mendukung posisi mereka.

Dalam situasi ini, instabilitas politik dan perpecahan dapat diperkuat melalui penggunaan populisme digital sebagai taktik. Selain itu, di era Internet, media sosial dan platform lainnya dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam politik. Ini mungkin menjadi kekuatan yang bermanfaat jika digunakan untuk memperkuat demokrasi dengan mempromosikan diskusi yang lebih jujur dan lebih banyak keterlibatan. Namun, jika diabaikan, hal ini juga dapat memperkuat narasi populis yang memecah belah masyarakat dan memperburuk polarisasi sosial. Penting untuk diingat bahwa populisme di era digital bukanlah fenomena tunggal; sebaliknya, seringkali muncul sebagai hasil dari konflik dan ketidakpuasan dalam masyarakat. Strategi komprehensif yang mencakup pengendalian yang masuk akal terhadap platform digital, pendidikan publik, dan pemahaman yang lebih dalam tentang isu-isu rumit yang dihadapi masyarakat diperlukan untuk melawan populisme di era digital [13].

Dalam berbagai situasi, populisme dapat dikatakan sebagai ideologi politik yang dapat mengambil berbagai bentuk, serta memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri. Populisme di era digital ini menghadapkan masyarakat pada kenyataan bahwa terdapat narasi-narasi politik yang akan menggiring mereka dengan mudahnya hanya dengan mengakses internet atau media sosial. Masyarakat akan kesulitan menghadapi populisme digital secara negatif apabila tidak muncul kesadaran dalam diri individu-individu saat mulai menangkap sinyal atau pesan yang disampaikan oleh para pemimpin populis ini. Namun apabila

masyarakat ataupun individu-individu mulai memahami tujuan dari para pemimpin populis, dan mampu mengendalikan diri agar tidak dimanfaatkan dalam hal negative, maka hal tersebut akan berdampak positif pada bangsa dan negara, terutama dalam sejarah politik di Indonesia.

Pengaruh Media Sosial Terhadap Pemikiran Politik Masyarakat

Setiap platform media sosial memiliki pengguna yang berasal dari kelompok-kelompok dengan latar belakang berbeda. Terjadi semacam pengelompokan masyarakat dengan tingkatan-tingkatan yang dilihat dari mayoritas pengguna platform tersebut. Contohnya, di Instagram masyarakat cenderung menjadikan aplikasi tersebut sebagai ajang pamer dan menyebutnya dengan *personal branding*, Berbagi foto dan video dengan pengikut adalah tujuan utama Instagram. sedangkan di Facebook masyarakat lebih kepada menceritakan kehidupannya secara alami dan berbagi kebahagiaan, Facebook memprioritaskan konektivitas sosial yang serbaguna, yang memungkinkan pengguna untuk berbagi konten dan terhubung dengan teman, keluarga, dan komunitas mereka. di whatsapp Masyarakat lebih condong mengutamakan aplikasi whatsapp ini sebagai media komunikasi yang lebih privasi dari Facebook ataupun Instagram, jadi whatsapp berfokus pada komunikasi individu atau grup kecil. Dikutip dalam website GoodStats.[14] ditemukan bahwa media sosial yang paling efektif atau paling banyak diakses adalah Whatsapp dengan persentase 92,1%, urutan kedua Instagram 89,15%, ketiga Facebook 83,8% dan TikTok di urutan keempat dengan jumlah persentase 70,8%. Pengguna internet di Indonesia mencapai 78% dan merupakan pengguna aktif media sosial. Hingga Januari 2023, setidaknya 167 juta orang di Indonesia menggunakan media sosial. Ini merupakan 78% dari 212,9 juta pengguna internet negara, atau sekitar 60,4% dari 276,4 juta orang.

Salah satu kontributor teknologi yang paling signifikan terhadap transformasi berbagai aspek kehidupan manusia adalah internet, khususnya media sosial, yang kini menjadi bagian esensial dan fondasi utama dalam kehidupan manusia. Salah satu cara media sosial memengaruhi politik adalah melalui penyebaran berita dengan cepat, hasil jajak pendapat, dan rumor. Dampak dari polling dan jajak pendapat politik sangat signifikan dalam setiap kampanye politik. Karena seringkali masyarakat menemui beberapa hasil jajak pendapat yang bertentangan yang diposting pada hari yang sama.

Dengan kemajuan media sosial, banyak organisasi termasuk lembaga politik dan pemerintah memanfaatkan platform ini untuk meningkatkan kinerja mereka serta mendorong kemajuan pembangunan bangsa. Praktik ini secara berkelanjutan dapat dimanfaatkan oleh korporasi, perusahaan swasta, lembaga pemerintahan, pejabat, lembaga politik, atau tokoh politik untuk menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat secara keseluruhan melalui media sosial. Kebebasan untuk menyampaikan ide di media sosial mendorong pengguna untuk lebih aktif dan kritis terhadap berita dan isu yang muncul. Ini menandakan perkembangan yang signifikan dalam demokrasi di Indonesia, menuntut masyarakat untuk bertindak secara dewasa dalam segala aspek, termasuk dalam konteks politik. Meskipun terdapat berbagai kepentingan yang dianggap positif, di sisi lain, masih ada aspek negatif yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah penyalahgunaan media sosial dalam penyebaran informasi yang tidak benar (hoax). Selain itu, masih ada sebagian orang yang kurang melakukan penelitian mendalam sebelum membagikan atau mengomentari berita atau isu yang mereka terima, yang pada akhirnya dapat mengganggu proses demokrasi yang sedang berlangsung[15].

Perkembangan teknologi informasi yang semakin teramplifikasi, terutama dengan munculnya media sosial, telah memperkuat pandangan bahwa hubungan antara media sosial dan realitas politik menunjukkan semakin kaburnya batasan antara kelompok elit dan kelompok massa yang memberi dukungan.

4. KESIMPULAN

Populisme dalam komunikasi politik digunakan oleh pemimpin untuk meraih dukungan rakyat, dengan citra yang kuat menjadi kunci untuk mendapatkan popularitas dan memengaruhi elektabilitas calon politik. Meskipun populer, diskusi tentang populisme masih jarang di masyarakat, terutama di Indonesia. Ruang publik digital menjadi sarana efektif untuk menyebarkan wacana populis dan memobilisasi massa. Era digital menekankan pada daya tarik, sensitivitas, dan manipulasi dalam informasi. Meskipun memperluas audiens, populisme digital juga meningkatkan risiko penyebaran informasi palsu. Ini dapat memperkuat

instabilitas politik dan perpecahan, atau meningkatkan keterlibatan politik jika dimanfaatkan dengan baik. Solusi memerlukan pengendalian platform digital, pendidikan publik, dan pemahaman Masyarakat.

Media sosial, khususnya internet, telah menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia, memengaruhi berbagai aspek kehidupan termasuk politik. Salah satu dampak utamanya adalah penyebaran berita, hasil jajak pendapat, dan rumor dengan cepat. Dampak politiknya terlihat dari pengaruh jajak pendapat dalam kampanye politik, meskipun seringkali hasilnya bertentangan. Banyak organisasi, termasuk lembaga politik dan pemerintah, menggunakan media sosial untuk meningkatkan kinerja mereka dan memajukan pembangunan bangsa. Namun, ada kekhawatiran akan penyalahgunaan media sosial, terutama dalam penyebaran informasi palsu atau kurangnya penelitian sebelum membagikan berita, yang dapat mengganggu proses demokrasi. Perkembangan teknologi informasi, terutama media sosial, juga memperkuat pandangan bahwa batasan antara elit dan massa semakin kabur dalam konteks politik.

REFERENSI

L. Judijanto, R. Maulinda, S. Zulaika, I. Tjahyadi, and S. Suroso, 'Pengaruh Sumber Informasi dan Interaksi Sosial di Media Sosial terhadap Pembentukan Opini Politik Masyarakat di Indonesia', *SISH*, vol. 1, no. 01, pp. 21–31, Dec. 2023, doi: 10.58812/sish.v1i01.303.

N. Alfiyani, 'MEDIA SOSIAL SEBAGAI STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK', vol. 22, no. 2, 2018.

A. Ardipandanto, 'Dampak Politik Identitas Pada Pilpres 2019: Perspektif Populisme [The Impact of Identity Politics On President Election 2019: Populism Perspective]', *JP*, vol. 11, no. 1, pp. 43–63, Jul. 2020, doi: 10.22212/jp.v11i1.1582.

D. Deha, 'REPRESENTASI IDEOLOGI POPULISME DALAM PEMBERITAAN TEMPO CO', *Interaksi*, vol. 10, no. 2, pp. 150–165, Dec. 2021, doi: 10.14710/interaksi.10.2.150-165.

C. Mouffe, *For a left populism*. London ; New York: Verso, 2018.

M. I. Hilmy, 'Fenomena Gerakan Populisme Dalam Kemunduran Demokrasi', *jch*, vol. 5, no. 2, pp. 145–156, Nov. 2020, doi: 10.22219/jch.v5i2.13080.

R. E. Shaira, T. D. Nurida, and R. Hidayat, 'Populisme dan Intoleransi Dalam Dinamika Sosial Budaya Masyarakat Digital Indonesia', *IJSED*, vol. 3, no. 1, pp. 43–52, Jul. 2021, doi: 10.52483/ijsed.v3i1.51.

N. A. Muhammad, 'Populisme dan Dinamika Otoritas Keagamaan dalam Islam di Media Sosial', *JP*, vol. 4, no. 2, p. 113, Oct. 2021, doi: 10.22373/jp.v4i2.10487.

J. Juleha, J. Yuniar, and N. R. Marsuki, 'Peran Media Sosial Dalam Dinamika Opini Publik dan Partisipasi Politik Era Digital'.

M. S. Pandu and D. A. Candraningrum, 'Karakteristik Populisme Gubernur Jawa Barat (Ridwan Kamil) dalam Postingan Instagram 27 Mei 2018 – 27 Juni 2018', *J. Koneksi*, vol. 4, no. 2, p. 380, Oct. 2020, doi: 10.24912/kn.v4i2.8230.

B. N. Budiman, 'POPULISME DI INDONESIA SEBAGAI ANCAMAN POLARISASI MASYARAKAT', *PJK*, pp. 235–246, Oct. 2021, doi: 10.52738/pjk.v1i2.53.

Dina Destari, 'Pendidikan Global di Era Digital: Transformasi dalam Skala Internasional', *JPDWS*, vol. 1, no. 08, pp. 538–553, Aug. 2023, doi: 10.58812/jpdws.v1i08.602.

R. Rizana, A. S. Utama, and I. Svinarky, 'PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP DINAMIKA MASYARAKAT DAN LAHIRNYA BENTUK-BENTUK PERBUATAN HUKUM BARU DI MEDIA SOSIAL', *JCK*, vol. 9, no. 2, pp. 87–98, Nov. 2021, doi: 10.33884/jck.v9i2.4520.

R. Hasya, 'Whatsapp dipakai oleh sekitar 92,1 persen warganet Indonesia berusia 16-64 tahun', Whatsapp Teratas, Ini 7 Media Sosial Paling Banyak Digunakan Warganet Indonesia Sepanjang 2022. Accessed: May 30, 2024. [Online]. Available: https://goodstats.id/article/whatsapp-teratas-ini-7-media-sosial-paling-banyak-digunakan-warganet-indonesia-sepanjang-2022-iJklw

F. Junaedi and F. G. Sukmono, Eds., *Komunikasi politik di Indonesia*. Yogyakarta: Buku Litera, 2019.